



EFEKTIVITAS PROGRAM KREDIT POTONG GAJI BPR BANK DAERAH PATI TERHADAP PERANGKAT DESA KABUPATEN PATI

Hilya Khoirin Nida¹
Universitas Terbuka¹
khoirinnida1122@gmail.com¹

ABSTRACT

In short, this study aims to assess the salary deduction credit scheme run by BPR Bank Daerah Pati in collaboration with village officials in Pati Regency. In this study, the author's analytical approach is to describe the stages of data collection by observing the behavior of experts and graduates of accounting programs. In addition, interviews were conducted with a number of bank employees, and secondary data analysis was carried out on internal documents of BPR Bank Daerah Pati. The results, in the period from January 2023 to April 2025 there was a significant increase. Village officials said that the automatic, fast, and minimal delay payment mechanism made this financing very efficient and beneficial. Salary funds at the beginning of the budget year are a significant barrier that has an impact on the BI Checking score, as a result of the selected payments, which causes problems in financing. To overcome this, BPR Bank Daerah Pati implemented blocked savings as a temporary measure. The salary deduction credit program appears to have shown ease of access, rapid credit repayment, and better economic stability at the village level as a whole, despite the obstacles. The effectiveness of this program depends on the comprehensive understanding of savers and efficient collaboration between local governments and banks.

Keywords: *Salary deduction credit, effectiveness, village apparatus, BPR, Pati Regency, and Economic welfare.*

ABSTRAK

Secara singkat, penelitian ini bertujuan untuk menilai skema kredit potong gaji yang dijalankan oleh BPR Bank Daerah Pati yang bekerja sama dengan perangkat desa di Kabupaten Pati. Dalam penelitian ini, pendekatan analisis yang dilakukan penulis adalah dengan menguraikan tahapan-tahapan pengumpulan data dengan mengamati perilaku para pakar dan lulusan program akuntansi. Selain itu, wawancara dilakukan dengan sejumlah karyawan bank, dan analisis data sekunder dilakukan terhadap dokumen-dokumen internal BPR Bank Daerah Pati. Adapun hasilnya, dalam periode dari Januari 2023 hingga April 2025 terjadi peningkatan yang signifikan. Perangkat desa mengatakan bahwa mekanisme pembayaran yang otomatis, cepat, dan minim penundaan membuat pembiayaan ini sangat efisien dan bermanfaat. Dana gaji di awal tahun anggaran menjadi penghalang yang signifikan yang berdampak pada skor BI Checking, sebagai akibat dari pembayaran yang dipilih, yang menyebabkan masalah dalam pembiayaan. Untuk mengatasi hal ini, BPR Bank Daerah Pati menerapkan tabungan blokir sebagai langkah sementara. Program kredit pemotongan gaji tampaknya telah menunjukkan kemudahan akses, pembayaran kembali kredit yang meningkat dengan cepat, dan stabilitas ekonomi yang lebih



baik di tingkat desa secara keseluruhan, terlepas dari adanya hambatan. Efektivitas program ini bergantung pada pemahaman penabung secara menyeluruh dan kolaborasi yang efisien antara pemerintah daerah dan bank.

Kata Kunci: Kredit potong gaji, efektivitas, perangkat desa, BPR, Kabupaten Pati, dan Kesejahteraan ekonomi.

PENDAHULUAN

Bank secara khusus memiliki peran strategis yang sangat penting dalam menjaga perekonomian suatu negara. Selain berfungsi sebagai tempat menyimpan dan memindahkan uang, Bank saat ini juga mendorong pertumbuhan ekonomi regional dan lokal. Industri perbankan dimaksudkan untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional secara berkelanjutan, terutama dengan memperkuat komunitas lokal melalui akses yang adil terhadap pendanaan, sebagaimana dinyatakan dalam UU No. 10 Tahun 1998 Pasal 29. Dalam mendukung peran strategis tersebut, stabilitas sistem keuangan internal menjadi hal yang sangat penting. Seperti ditegaskan oleh (Aslah & Tandean, n.d.) “Maka dari itu perlu sekali perbankan memiliki sistem kerja keuangan yang stabil dan baik.”

Kredit potong gaji adalah salah satu jenis produk pendanaan yang berkembang pesat. Program ini ditujukan untuk individu dengan pendapatan tetap, seperti pegawai negeri, karyawan swasta, maupun perangkat desa. Pendekatan ini mengurangi risiko kredit macet dan memudahkan pembayaran angsuran dengan cara memotong langsung dari gaji bulanan. Lembaga keuangan menggunakan pendekatan ini secara umum karena keefektifannya, terutama Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang menjangkau hingga ke pelosok desa.

(Budiana & Dewi, 2022) menjelaskan bahwa menggunakan SK perangkat desa sebagai jaminan pinjaman memberikan kepastian hukum dan meningkatkan kepercayaan bank dalam memberikan kredit. Selain mempermudah proses administrasi, skema pemotongan gaji berdasarkan SK perangkat desa juga mempercepat proses pencairan kredit dan mengurangi kemungkinan keterlambatan pembayaran. Menurut tinjauan statistik dari BPR Bank Daerah Pati, terdapat peningkatan yang signifikan sejak Januari 2023 hingga April 2025. Grafik yang tinggi ini menunjukkan besarnya keinginan dan kebutuhan para perangkat desa akan akses pendanaan yang cepat dan mudah. Salah satu daya tarik utama pengajuan kredit ini adalah tidak adanya persyaratan agunan fisik.

Namun, terlepas dari antusiasme terhadap program ini, bank menghadapi kendala dan risiko yang signifikan pada awal tahun anggaran karena keterlambatan pembayaran gaji perangkat desa. Mekanisme pemotongan otomatis tidak dapat berfungsi dengan baik apabila gaji perangkat desa tidak dibayarkan sesuai jadwal. Akibatnya, angsuran yang seharusnya dipotong secara otomatis menjadi tertunda, yang kemudian dicatat sebagai penundaan dalam sistem keuangan. Meskipun bukan karena kelalaian debitur hal ini berdampak negatif pada catatan kredit (BI Checking) perangkat desa. Kondisi ini menimbulkan dua risiko utama bagi BPR, yaitu berupa risiko operasional, karena bank harus menyesuaikan arus kas dan membentuk dana cadangan untuk



menutupi tunggakan sementara, dan risiko reputasi, karena penumpukan kredit macet dari aparat desa dapat mengurangi citra profesional bank dan kepercayaan masyarakat terhadap kegiatan operasional bank. Selain itu, jika tidak diantisipasi, hal ini dapat berdampak pada penilaian otoritas pengawas terhadap kesehatan bank dan seluruh portofolio kreditnya.

(Purba et al., 2024) menegaskan bahwa perubahan suku bunga dan keterlambatan pembayaran memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja bank dan perilaku konsumen. Bank menghadapi peningkatan risiko operasional dan reputasi, termasuk terganggunya evaluasi kualitas aset oleh regulator, ketika sistem pemotongan gaji tidak berjalan dengan baik karena adanya penyebab luar seperti keterlambatan pembayaran gaji. Penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa sistem kredit potong gaji memberikan berbagai manfaat, termasuk kemudahan pembayaran. Pentingnya legalitas surat keputusan perangkat desa sebagai dasar penerbitan kredit dan upaya penyelesaian kredit macet dibahas oleh (Budiana & Dewi, 2022). (Sulistiyawati et al., 2023) menunjukkan bahwa memiliki akses terhadap pendanaan di desa dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama jika digabungkan dengan pemahaman dasar tentang keuangan.

Namun, sebagaimana dijelaskan oleh (Ansori, 2022), keterlibatan aktif masyarakat dan dukungan keuangan dari lembaga penyelenggara sangat penting bagi keberhasilan inisiatif keuangan mikro. Hal ini sejalan dengan (F. Savitri, 2021), yang menekankan pentingnya audit operasional dalam menjaga efektivitas pinjaman. Sementara itu, (Purba et al., 2024) menyoroti bahwa suku bunga dan faktor makro lainnya berdampak pada keinginan masyarakat untuk mendapatkan pinjaman. Sehubungan dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini diharapkan dapat membantu secara signifikan dalam menciptakan kebijakan pinjaman di tingkat desa yang lebih inklusif dan responsif terhadap dinamika lokal.

Sebagai upaya mengurangi dampak tersebut, BPR Bank Daerah Pati menerapkan kebijakan tabungan blokir senilai tiga kali angsuran sebagai dana cadangan untuk mengantisipasi keterlambatan gaji. Pada bulan-bulan awal, metode ini berhasil mencegah kredit macet, namun demikian, masih diperlukan sosialisasi yang ekstensif untuk memastikan bahwa para perangkat desa memahami operasi dan tujuannya. Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan program pinjaman berbasis masyarakat, menurut studi oleh (Ansori, 2022), adalah pemahaman debitur tentang metode pembiayaan dan risiko kredit.

Selain itu, masalah lainnya adalah rendahnya literasi keuangan. Bunga, jangka waktu, dan konsekuensi dari keterlambatan cicilan merupakan konsep yang belum begitu dipahami oleh sebagian besar perangkat desa. (Sulistiyawati et al., 2023) menunjukkan bahwa akses kredit yang disertai dengan edukasi keuangan berdampak pada kesejahteraan masyarakat desa, termasuk pengelolaan keuangan keluarga, secara langsung meningkat ketika kredit tersedia dan pendidikan mengenai keuangan diberikan.

Bagian penting lainnya dalam penyaluran kredit adalah pengawasan operasional dan audit internal. Menurut (F. Savitri, 2021) audit operasional di lembaga keuangan sangat bermanfaat untuk meningkatkan efektivitas penyaluran kredit dan mengurangi jumlah kredit bermasalah. Oleh karena itu, BPR harus memastikan bahwa sistem pengawasan dioperasikan dengan baik dan



dimasukkan ke dalam kerangka kerja skema kredit potong gaji.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai seberapa baik skema kredit potong gaji BPR Bank Daerah Pati bagi para perangkat di Kabupaten Pati. Fokusnya adalah untuk melihat manfaat yang dirasakan debitur, kendala yang mereka hadapi, dan bagaimana mereka menanggapi sistem yang telah diterapkan. Diharapkan bahwa kajian ini akan memberikan kontribusi pada perbaikan kualitas layanan dan aturan kredit di masa depan dengan menganalisis secara mendalam pendapat para perangkat desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini adalah studi kasus yang berfokus pada perangkat desa di Kabupaten Pati sebagai subjek penelitian untuk mengetahui lebih jauh mengenai persepsi mereka terhadap pelaksanaan dan dampak program. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, di mana BPR Bank Daerah Pati beroperasi dan memberikan pinjaman dengan sistem potong gaji kepada perangkat desa. Seluruh perangkat desa di Kabupaten Pati yang menjadi debitur kredit potong gaji di BPR Bank Daerah Pati merupakan populasi dalam penelitian ini. Wawancara mendalam dengan pegawai BPR terkait dan perangkat desa digunakan untuk mengumpulkan data. Wawancara semi-terstruktur digunakan untuk memungkinkan pengembangan materi yang lebih fleksibel, terutama yang berkaitan dengan kesan responden terhadap kemudahan akses, manfaat yang dirasakan, dan hambatan dalam keikutsertaan. Hasil wawancara diperkuat dengan data sekunder dari wawancara serta dokumentasi pendukung termasuk laporan kredit dan data internal BPR Bank Daerah Pati.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bank adalah organisasi keuangan yang memainkan peran penting dalam menjaga pertumbuhan dan stabilitas ekonomi dalam skala regional dan nasional. Bank berkontribusi dalam pengembangan akses keuangan yang inklusif untuk semua lapisan masyarakat melalui upaya pengumpulan dan penyaluran dana. Bank Perekonomian Rakyat (BPR) merupakan salah satu jenis organisasi perbankan yang memainkan peran penting di daerah. Dengan proses yang lebih cepat dan mudah, BPR melayani masyarakat lokal dan sektor mikro, termasuk perusahaan kecil dan perangkat desa, berbeda dengan bank umum.

Perangkat desa merupakan target dari skema kredit potong gaji yang diciptakan BPR Bank Daerah Pati sebagai inovasi pembiayaan di Kabupaten Pati. Program ini menawarkan efisiensi yang tinggi dan mitigasi risiko kredit macet yang kuat dengan menggunakan SK pengangkatan sebagai jaminan administratif dan sistem pemotongan angsuran langsung dari gaji bulanan.

Ketertarikan para perangkat desa untuk mengikuti program kredit potong gaji yang ditawarkan oleh BPR Bank Daerah Pati semakin meningkat dari waktu ke waktu. Hal ini menunjukkan bahwa program ini mampu memenuhi kebutuhan pendanaan mereka. Salah satu kepala desa yang sedang menjalani proses realisasi, menyatakan bahwa program ini menawarkan kemudahan yang nyata dalam memenuhi kebutuhannya tanpa prosedur yang berbelit-belit seperti yang dilakukan oleh lembaga perbankan lainnya. "Saya sangat terbantu dengan adanya program dari BPR Bank Daerah Pati ini, Bu. Alhamdulillah,



prosesnya cepat, mudah, dan langsung dipotong dari gaji saya, sehingga saya tidak perlu khawatir lupa membayar pinjaman untuk keperluan sekolah anak dan perbaikan rumah,” ujar Pak Ahmad, seorang perangkat desa dari Kecamatan Gabus.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pelaksanaan dan hasil dari program ini, saya lampirkan data yang saya peroleh dari internal BPR Bank Daerah Pati. Data tersebut menunjukkan total penyaluran kredit yang direalisasikan melalui program pemotongan gaji perangkat desa di Kabupaten Pati dari bulan Januari 2023 sampai dengan bulan April 2025, yang dapat digunakan sebagai perbandingan.

Tabel. 1 Laporan Realisasi Berdasarkan Jenis Pinjaman Periode Tanggal 1 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

Jenis Pinjaman	Noa	Plafond	Tabungan	Realisasi Bersih
KREDIT BULANAN PEGAWAI	436	40,493,400,000	1,147,619,78 9	38,741,505,21 1

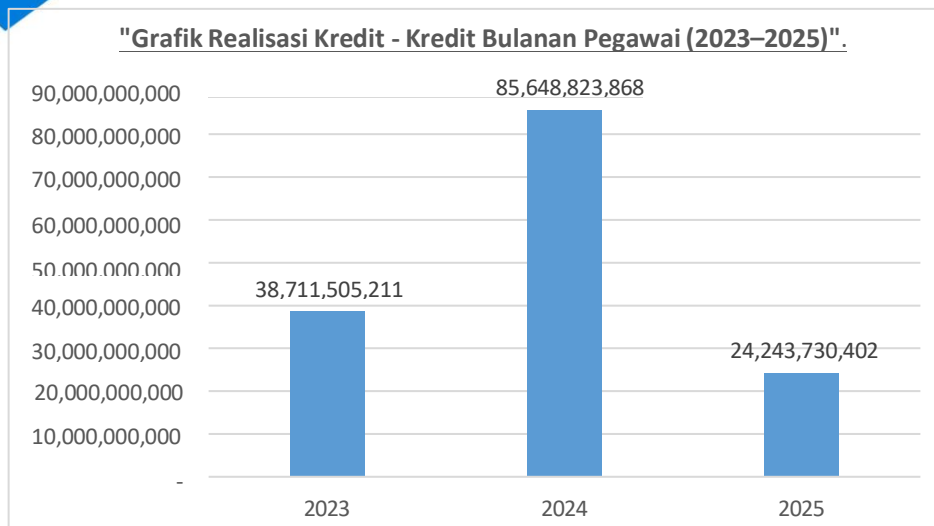
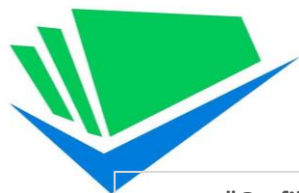
Tabel. 2 Laporan Realisasi Berdasarkan Jenis Pinjaman Periode Tanggal 1 Januari 2024 S/D 31 Desember 2024

Jenis Pinjaman	Noa	Plafond	Tabungan	Realisasi Bersih
KREDIT BULANAN PEGAWAI	884	89,919,600.000	2,875,691,63 2	85,648,823,86 8

Tabel. 3 Laporan Realisasi Berdasarkan Jenis Pinjaman Periode Tanggal 1 Januari 2025 S/D 30 April 2025

Jenis Pinjaman	Noa	Plafond	Tabungan	Realisasi Bersih
KREDIT BULANAN PEGAWAI	294	25,498,500.000	869,369,59 8	24,243,730,40 2

Berikut saya tampilkan grafik terkait data laporan realisasi mulai Januari 2023 sampai dengan April 2025 :



Gambar 1. Total Realisasi Penyaluran Kredit Potong Gaji Sumber: Laporan tahunan BPR Bank Daerah Pati

Berdasarkan grafik realisasi kredit selama periode Januari 2023 hingga April 2025, terlihat bahwa, pada tahun 2024 mencatatkan angka pinjaman tertinggi dengan total Rp 85,6 miliar, hampir dua kali lipat dari hasil tahun sebelumnya. Ini mencerminkan peningkatan yang berarti dalam distribusi kredit oleh BPR Bank Daerah Pati, terutama untuk program Kredit Bulanan Pegawai. Di tahun 2023, total pencapaian mencapai Rp 38,7 miliar, yang menjadi fondasi untuk pertumbuhan di tahun berikutnya. Angka tersebut sudah mencerminkan kinerja yang cukup baik. Hingga April 2025, realisasi telah mencapai Rp 24,2 miliar. Jika diproyeksikan sampai akhir tahun, kemungkinan besar angka ini akan mendekati atau bahkan melampaui nilai dari tahun-tahun sebelumnya. Dengan pencapaian ini hanya dalam waktu 4 bulan, kinerja penyaluran kredit 2025 pantas mendapat pujian dan menunjukkan tren yang sangat positif. Selain strategi pemasaran yang ekstensif, salah satu karyawan BPR Bank Daerah Pati berpendapat bahwa melonjaknya realisasi tahun 2024 juga disebabkan oleh kenaikan gaji perangkat desa. Dana ini tentunya dapat digunakan lagi untuk menaikkan plafon kredit, yang dikenal dengan istilah kredit potong gaji fasilitas kedua.

Program pemotongan gaji ini memang terbukti bermanfaat, tapi juga menimbulkan sejumlah kendala bagi para penerima fasilitas dan BPR Bank Daerah Pati. Masalah krusialnya adalah sering terlambatnya pembayaran gaji perangkat desa di awal tahun. Faktanya, selama tiga bulan pertama, gaji seringkali baru cair di bulan keempat, mengakibatkan saldo gaji kosong selama periode itu. Situasi ini berdampak pada skor BI Checking karena sistem secara otomatis mencatat keterlambatan pembayaran pinjaman, padahal bukan kesalahan debitur. Konsekuensinya, riwayat kredit perangkat desa jadi kurang baik dan berpotensi menyulitkan pengajuan pinjaman di kemudian hari.

Selain itu, pihak BPR Bank Daerah Pati yang menjalankan program kredit potong juga menghadapi beberapa tantangan. Secara umum, ada dua jenis risiko utama yang teridentifikasi. Yang pertama adalah risiko operasional, yang muncul ketika angsuran tidak dibayarkan secara bersamaan dalam periode



tertentu. Situasi ini memaksa pihak bank untuk menyesuaikan arus kas internal dan menyiapkan dana cadangan untuk mengatasi potensi masalah kredit dalam jangka pendek. Ketergantungan pada jadwal pencairan gaji perangkat desa yang tidak stabil mengganggu efisiensi operasional dan menambah beban administrasi.

Kedua, ada kemungkinan terjadinya masalah reputasi, yang berhubungan dengan pandangan publik mengenai kredibilitas dan profesionalisme BPR. Ketika banyak catatan kredit yang bermasalah muncul dari segmen perangkat desa, meskipun tidak diakibatkan oleh kelalaian debitur, hal ini tetap bisa menurunkan persepsi positif lembaga di mata masyarakat dan regulator. Dalam jangka panjang, penumpukan masalah ini bisa mengurangi kepercayaan dari pemangku kepentingan, menurunkan daya tarik dari program-program sejenis, serta mempengaruhi hasil evaluasi kesehatan bank oleh otoritas yang berwenang.

BPR Bank Daerah Pati menawarkan solusi untuk masalah yang dihadapi oleh para peminjamnya. Mereka menerapkan sistem tabungan yang diblokir dengan jumlah tiga kali lipat dari angsuran setiap perangkat desa. Proses tabungan yang diblokir ini dilakukan selama periode Over Booking (OB) dari bulan Januari hingga Maret untuk pembayaran angsuran. Setelah perangkat desa menerima gaji mereka, dana tersebut dipindahkan ke rekening mereka dan kemudian diblokir lagi untuk menggantikan tabungan yang digunakan untuk pembayaran angsuran. Rizky Adi, seorang karyawan di BPR Bank Daerah Pati, menyampaikan bahwa metode ini membantu memastikan angsuran dibayar secara tepat waktu, sehingga mengurangi kemungkinan keterlambatan pembayaran dan meminimalkan debitur yang berstatus Kurang Lancar (KL).

Berdasarkan kajian yang dilakukan melalui wawancara langsung dengan karyawan BPR Bank Daerah Pati, terungkap adanya berbagai langkah yang telah dan sedang diupayakan oleh bank untuk mengurangi dampak dari berbagai masalah yang timbul selama penerapan program kredit potong gaji. Salah satu langkah utama yang diambil adalah pengembangan model proyeksi arus kas yang lebih fleksibel dan responsif terhadap pola musiman, terutama pada awal tahun anggaran ketika sering terjadi keterlambatan pencairan APBD desa. Proyeksi ini dibuat untuk memberikan gambaran yang lebih tepat mengenai kebutuhan dana likuid dan cadangan yang harus disiapkan oleh manajemen, agar operasional bank tetap terjaga meskipun ada ketidakpastian dalam penerimaan angsuran kredit.

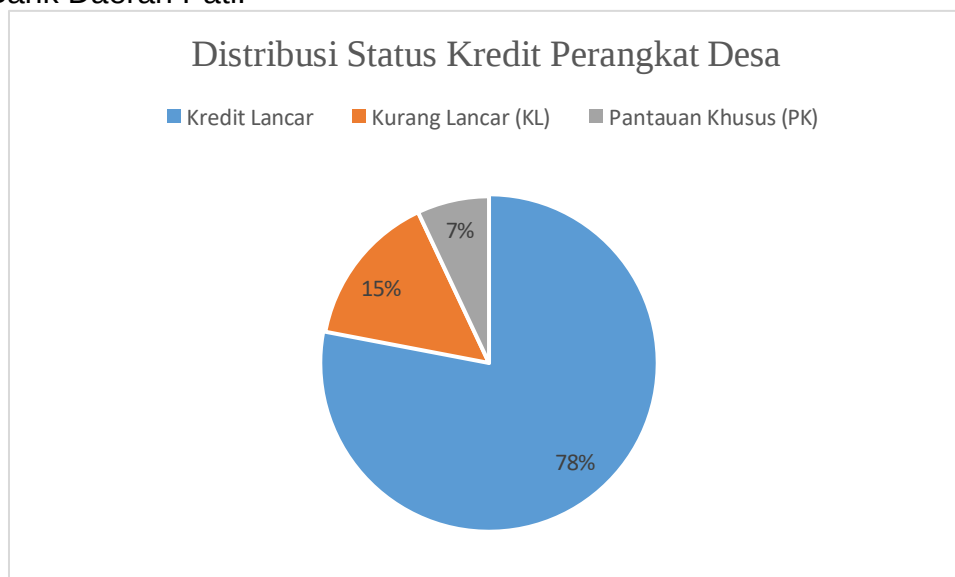
Selain itu, BPR juga mempertimbangkan untuk menerapkan kebijakan grace period, yaitu masa tenggang untuk pembayaran angsuran pokok selama satu hingga dua bulan pertama dalam tahun anggaran. "Kami juga sedang mempertimbangkan pelaksanaan grace period di awal tahun anggaran. Kami berharap agar catatan kredit perangkat desa tidak terganggu hanya karena keterlambatan pencairan gaji," ucap Rizky Adi. Dalam skema ini, meskipun bunga kredit tetap berjalan, pembayaran pokok dapat ditunda sementara, sehingga tidak langsung dicatat sebagai tunggakan dalam sistem perbankan. Kebijakan ini memberikan ruang transisi yang lebih fleksibel bagi perangkat desa yang terkena dampak keterlambatan gaji tanpa mengganggu kelancaran sistem kredit secara keseluruhan. Namun, untuk keberhasilan implementasinya, skema ini perlu disepakati dan diinformasikan dengan baik sejak awal penandatanganan



kontrak kredit.

Terkait risiko reputasi yang mungkin muncul akibat adanya akumulasi catatan kredit yang bermasalah, pihak BPR menyadari pentingnya untuk bersikap terbuka dan kooperatif terhadap otoritas pengawas seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Maka dari itu, diharapkan bank dapat secara berkala menyampaikan laporan tentang kondisi teknis di lapangan yang berpotensi mengganggu kualitas kredit, beserta strategi mitigasi yang telah dilaksanakan atau yang akan dilakukan. Transparansi ini sangat penting untuk menghindari asumsi negatif tentang kondisi keuangan bank, sekaligus menjaga penilaian kesehatan lembaga dari regulator tetap berada dalam kategori yang baik.

Di sisi lain, pelaksanaan program kredit potong gaji juga membawa dampak positif bagi BPR secara internal, terutama dalam pengelolaan risiko kredit. Program ini secara signifikan membantu mengurangi jumlah nasabah yang masuk dalam kategori Pemantauan Khusus (PK) dan Kurang Lancar (KL), karena pembayaran angsuran dilakukan secara otomatis dan terjadwal. Untuk menilai efektivitas program kredit potong gaji dalam pengelolaan risiko, di bawah ini disajikan data distribusi status kredit perangkat desa yang menjadi debitur di BPR Bank Daerah Pati:



Gambar 2. Distribusi Status Kredit Perangkat Desa Sumber: Simulasi Data Berdasarkan Temuan Lapangan

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa, 78% kredit berada dalam kategori lancar, menunjukkan mayoritas debitur membayar angsuran tepat waktu. Namun masih ada 15% masuk kategori Pantauan Khusus (PK), yang mencerminkan adanya keterlambatan ringan, serta masih ada sekitar 7% sudah masuk dalam Kurang Lancar (KL), yaitu debitur yang membutuhkan perhatian lebih.

Meskipun sudah ada program tabungan blokir, tidak semua debitur secara otomatis ikut serta atau memiliki saldo blokir yang cukup. Ada juga situasi di mana dana blokir belum diproses sesuai waktu yang ditentukan karena masalah teknis. Selain itu, beberapa perangkat desa dapat mengalami perpindahan tugas, berhenti aktif, meninggal dunia, atau kurang kooperatif. Faktor-faktor ini yang menyebabkan masih terdapat kredit yang tergolong Kurang Lancar dan



Pantauan Khusus. Oleh karena itu, dengan jumlah kredit lancar cukup tinggi, masih diperlukan upaya pendidikan, verifikasi data pegawai, dan peningkatan sistem pencatatan agar persentase kredit bermasalah dapat diturunkan lebih lanjut di masa yang akan datang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan riset yang telah kami lakukan, kami dapat menyimpulkan bahwa program pemotongan gaji untuk kredit di BPR Bank Daerah Pati telah memudahkan akses pembiayaan bagi perangkat desa di Kabupaten Pati. Program ini memberikan kemudahan dalam memperoleh kredit bagi para aparatur desa yang sebelumnya kesulitan dalam mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan tradisional. Dengan menggunakan Surat Keputusan (SK) pengangkatan sebagai jaminan administratif dan sistem pemotongan langsung dari gaji bulanan, BPR Bank Daerah Pati berhasil mengurangi risiko kredit macet dan meningkatkan efisiensi dalam proses penyaluran dana. (Syam & Musfira, 2021)(N. A. Savitri, 2022)

Pertumbuhan realisasi kredit dari tahun ke tahun menunjukkan tingginya kepercayaan dari perangkat desa terhadap program ini. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa tantangan, terutama yang berkaitan dengan keterlambatan dalam pencairan gaji perangkat desa di awal tahun anggaran. Situasi ini menyebabkan keterlambatan dalam pembayaran angsuran yang dapat menurunkan skor kredit debitur, meskipun keterlambatan tersebut bukanlah kesalahan mereka. Selain itu, BPR Bank Daerah Pati juga harus mengelola risiko operasional dan reputasi dengan baik. Berbagai upaya telah dilakukan oleh BPR Bank Daerah Pati untuk mengatasi permasalahan ini, seperti penerapan tabungan blokir, pengembangan model proyeksi arus kas yang adaptif, dan pertimbangan penerapan kebijakan grace period. Program ini juga memberikan dampak positif terhadap manajemen risiko internal bank dengan menekan jumlah kredit bermasalah secara signifikan. Meskipun demikian, keberhasilan jangka panjang program ini tetap bergantung pada koordinasi yang kuat antara BPR Bank Daerah Pati dan pemerintah daerah.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis ingin memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat:

1. Pemerintah Kabupaten Pati diharapkan lebih memperhatikan ketepatan waktu pencairan gaji perangkat desa, terutama di awal tahun anggaran. Hal ini penting agar tidak ada keterlambatan pembayaran cicilan yang bisa merusak reputasi kredit mereka.
2. BPR Bank Daerah Pati sebaiknya mulai menerapkan kebijakan masa tenggang secara resmi. Kebijakan ini memberikan keringanan waktu pembayaran pokok di awal tahun, sehingga debitur terhindar dari catatan kredit yang kurang baik.
3. Sosialisasi mengenai program kredit potong gaji perlu digencarkan kepada perangkat desa. Penjelasan mengenai manfaat, cara, dan tanggung jawab dalam program ini penting untuk membangun kesadaran akan pentingnya kelancaran pembayaran.
4. Kedepannya, BPR Bank Daerah Pati sebaiknya mempertimbangkan pengembangan sistem digital yang terintegrasi dengan data keuangan perangkat desa. Sistem ini akan membuat proses verifikasi dan pencatatan



cicilan menjadi lebih efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansori. (2022). Efektifitas Pinjaman Modal Tanpa Agunan Guna Mengembangkan Usaha Ultra Mikro Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Bank Wakaf Mikro Dimasa Pandemi Covid 19 Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 3(April), 49–58.
- Aslah, T., & Tandean, V. A. (n.d.). *FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA KEUANGAN PERBANKAN PADA MASA PANDEMI*.
- Budiana, I. N., & Dewi, N. L. P. P. prami. (2022). Penyelesaian Kredit Bermasalah Penyelesaian Kredit Bermasalah dalam Penggunaan Surat Keputusan (SK) Perangkat Desa sebagai Jaminan Kredit di Bank Pembangunan Daerah Bali di Kabupaten Badung. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(Vol. 6 No. 2 (2022): Agustus 2022), 14385–14392. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/4712/3985>
- Nugraeni, Paramitalaksmi, R., Wafa, Z., & Saputri, K. (2023). Persyaratan kredit mempengaruhi akses kredit formal UMKM. *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 5.
- Pidu, Y. R., Boki, Z., & Pakaya, L. (2022). Efektivitas Pengelolaan Dana Kredit Usaha Rakyat dalam Meningkatkan Pendapatan (Studi Kasus Pada Nasabah Bank BRI Unit Telaga Kota Gorontalo). *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 1(2). <https://doi.org/10.37479/jamak.v1i2.30>
- Purba, T. P., Dewi, D. S., Waidan, H., Palenewen, F., Tinggi, S., & Ekonomi, I. (2024). *DI PT . BANK NEGARA INDONESIA CABANG GAMBIR*. 6(1), 202–209.
- Savitri, F. (2021). *PERANAN AUDIT OPERASIONAL TERHADAP EFEKTIVITAS PEMBERIAN KREDIT (Studi Kasus pada PT . Pegadaian (Persero) Cabang Sukabumi)*. 1, 44–52.
- Savitri, N. A. (2022). Sistem Keputusan Pemberian Kredit Bagi Nasabah Pada PT. BPR BKK Pati (Persero) Cabang Jaken. *UNISSULA Institutional Repository*.
- Sulistiyawati, R., Fitriyani, I., & Kurniawansyah, K. (2023). ANALISIS TINGKAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAMPAK PEMBERIAN KREDIT (Studi Pada Debitur PD. BPR NTB Sumbawa). *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 11(1), 30–39. <https://doi.org/10.58406/jeb.v11i1.1151>
- Syam, M., & Musfira, R. (2021). Pengaruh Pemberian Kredit Usaha Rakyat (Kur) Pt Bank Rakyat Indonesia,Tbk (Persero) Unit Palakka Terhadap Peningkatan Pendapatan Ekonomi Usaha Mikro Kecil (Umk) Di Kota Watampone. *Islamic Banking and Finance*, 1(1), 73–81. <https://doi.org/10.30863/ibf.v1i1.3014>